



Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998

Yahya Aryanto Putro[✉], Hamdan Tri Atmaja, Ibnu Sodik

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2017
Disetujui September 2017
Dipublikasikan Oktober 2017

Keywords:

racial conflict, Surakarta.

Abstrak

Surakarta merupakan wilayah sebagai tujuan migrasi orang-orang Tionghoa dimasa lalu, orang-orang Tionghoa datang ke Surakarta dengan tujuan untuk berdagang. Salah satu akibatnya adalah meningkatnya potensi ketegangan hubungan antar etnis di Surakarta. Konflik rasial di eks-Karesidenan Surakarta ini sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda. Pada masa Orde Baru saja sudah terjadi tiga kali kerusuhan berskala besar yang terjadi pada tahun 1972-1998. Peristiwa rasial anti Tionghoa di Kota Surakarta ini memiliki faktor pemicu kerusuhan berskala kecil yang menjadi karakteristik unik yang mampu menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius. Faktor pemicu konflik di Surakarta pada tahun 1972-1998 yaitu terbentuknya mobilisasi massa, konflik individual serta aksi mahasiswa. Di bawah pemerintahan Orde Baru, ketegangan antara orang Cina dengan penduduk pribumi terus tumbuh sebagai akibat dari melebarnya jarak antara yang kaya dan yang miskin serta upah rendah yang diberikan kepada pejabat birokrasi, militer dan polisi.

Abstract

Surakarta is an area for Chinese people in the past, Chinese people coming to Surakarta for the purpose of trading. One consequence is the increased potential for inter-ethnic relations in Surakarta. Racial conflict in the Surakarta residency has occurred since the Netherlands colonial era. In the New Order era there have been three large-scale riots that occurred in 1972-1998. The anti-Chinese racial event in Surakarta city has triggered a small-scale riot that became a unique characteristic capable of causing enormous and very serious chaos. The triggering factor of conflict in Surakarta in 1972-1998 was the formation of mass mobilization, individual conflict and student action. Under the New Order government, tensions between the Chinese and the indigenous population continued to grow as a result of the widening gap between the rich and the poor and the low wages given to bureaucratic, military and police officials.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Surakarta merupakan daerah pemukiman yang cukup tua yang menjadi salah satu lokasi tujuan migrasi orang-orang Cina di masa lalu dan sebagai tempat tinggal mereka di masa sekarang. Salah satu akibatnya adalah meningkatnya potensi ketegangan hubungan antar etnis di sejumlah wilayah termasuk di Surakarta dan sekitarnya. Kota Surakarta sebagai pusat konflik terkenal dengan masyarakatnya yang lemah lembut, santun, perhitungan dan mengedepankan keharmonisan. Peristiwa rasial di Surakarta yang selama ini terjadi mengandung tanda tanya besar. Sikap santun dan lemah lembut masyarakat Surakarta ternyata mengandung sikap agresif yang luar biasa. Dalam interaksi sosial timbul masalah kesenjangan yang bersifat laten dan kadang-kadang menjadi penyulut timbulnya kerusuhan. Dalam realitas sosial orang-orang Tionghoa di Surakarta senantiasa mendapatkan stigma dan citra jelek, padahal realitas kultural orang-orang Tionghoa ikut berperan dalam pembentukan dan pengembangan budaya Jawa (Rustopo, 2007:2).

Penelitian ini membahas masalah identifikasi keTionghoan sebagai suatu topik yang penting dalam rangka memahami masalah Tionghoa sebagai etnis minoritas. Etnis minoritas Tionghoa masih sering dianggap sebagai sumber masalah. Etnis Tionghoa masih dianggap sebagai “*the other*” atau “yang lain” dari golongan yang ada (Windy Kinasih, 2007:10). Konflik bernuansa rasial merupakan suatu fenomena penting dan sangat menarik dalam perjalanan sejarah Kota Surakarta. Dalam penelitian pergulatan konflik Tionghoa-Jawa, Surakarta merupakan wilayah penelitian yang relevan. Konstelasi Sosial Surakarta menunjukkan bahwa Surakarta dihuni oleh banyak komunitas minoritas, terutama adalah etnis minoritas Tionghoa (Windy Kinasih, 2007:60).

Konflik rasial di eks-Karesidenan Surakarta ini sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda. Sekitar dua setengah abad yang lalu, yang dikenal dengan “Bedah Kartasura” pada tahun 1742. Tragedi besar-besaran tersebut terjadi di pusat-pusat otoritas,

yang saat itu Kartasura sebagai pusat Mataram. Sifat permusuhan yang melandasi pandangan antar etnis ini secara umum yang merebak ke permukaan adalah konflik Cina versus Pribumi. Stigma yang timbul dalam masyarakat pribumi adalah karena adanya kecemburuan ekonomi yang disebabkan karena pada masa orde baru perekonomian baik skala nasional maupun skala lokal yang dalam hal ini adalah wilayah Kota Surakarta yang masih didominasi oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa. Di bawah pemerintahan Orde Baru, ketegangan antara orang Cina dengan penduduk pribumi terus tumbuh sebagai akibat dari meluasnya jarak antara yang kaya dan yang miskin dalam negara serta upah rendah yang diberikan kepada pejabat birokrasi, militer dan polisi (Onghokham, 2008:24).

Masalah hubungan pribumi dan non pribumi hingga kini masih mengundang perdebatan sengit. Dalam serangkaian tragedi konflik rasial di Surakarta tahun 1972-1998 ini sudah banyak menelan korban jiwa, banyak gedung-gedung perkantoran, pertokoan, atau rumah-rumah yang hangus terbakar serta kendaraan-kendaraan transportasi warga juga tak luput dari amukkan massa. Penyebab dari konflik rasial di Surakarta menurut penulis dapat digolongkan ke dalam tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor *historis* dan faktor politik. Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi yaitu fenomena ekonomi modern dan tradisional, masalah perburuhan, masalah marjinalisasi kaum miskin dan krisis moneter menjadi pemicu terjadinya konflik rasial tersebut. Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan di atas, maka penulis ingin mengangkat judul skripsi ini yaitu “Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998”.

METODE

Metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek atau cara untuk mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan teratur (Pranoto, 2010:11). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985:32). Dengan menggunakan metode sejarah, diusahakan dapat merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau kemudian menyampaikan rekonstruksi sesuai dengan jejak-jejak masa lampau. Dalam pelaksanaan metode sejarah, terdapat empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Heuristik merupakan tahapan pertama dalam metode sejarah setelah menentukan topik penelitian. Heuristik adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah adalah bahan penulisan sejarah yang mengandung evidensi (bukti) baik lisan maupun tertulis (Pranoto, 2010:31). Dalam heuristik ini penulis dapat mengumpulkan berbagai sumber primer diantaranya Data dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu berasal dari surat kabar sejaman, seperti Suara Merdeka, Kompas, Solo Pos, Tempo, Kedaulatan rakyat, dll, serta dokumen yang terkait dan relevan dengan tema yang dapat diperoleh dari kantor arsip Museum Mandala Bhakti Semarang, Kantor Arsip Nasional Indonesia, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Surakarta, Monumen Pers Nasional, dll. Sumber primer lain yang berhasil ditemukan penulis dari Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Laporan Sekretaris Wakil Presiden RI 1967-1999 No. 441 dan Sekretaris Wakil Presiden RI 1967-1999 No. 476.

Kritik sumber, Kritik Sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber (Pranoto, 2010:35). Kritik sumber dilakukan untuk menentukan sumber-sumber yang penulis dapatkan untuk dijadikan data penelitian. Kritik sumber ini memudahkan peneliti untuk memfokuskan apa yang akan ditulis dalam laporan penelitian ini, dengan adanya kritik sumber ini penulis dapat menilai sumber-sumber yang diperoleh dapat memberikan informasi yang bisa dipercaya atau tidak, apakah dokumen yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan isinya atau keautentikannya atau tidak.

Interpretasi, langkah ini merupakan tahap menghubungkan antara fakta-fakta yang sama dan dilakukan penafsiran. Interpretasi

dipengaruhi oleh latar belakang, pengaruh, motivasi, dan pola pikir. Interpretasi akan mempengaruhi bagaimana jenis-jenis penulisan dalam laporan penelitian, karena data yang diperoleh akan sangat berfungsi bagi penulisan laporan dengan bantuan penafsiran dari penulis. Interpretasi cenderung akan menghasilkan subjektifitas dari penulis, akan tetapi dengan fakta-fakta yang ada penulis berusaha menampilkan data sesuai dengan keadaan yang ada dan mengurangi subjektifitas yang biasa terjadi dalam sebuah penafsiran.

Historiografi, langkah ini merupakan tahap akhir dari metode sejarah, setelah dilakukan beberapa tahap mulai dari heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Fakta-fakta sejarah yang penulis dapatkan di lapangan kemudian penulis rangkai menjadi suatu cerita sejarah yang disusun secara kronologis atau beruntun yang dihubungkan-hubungkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya dan ditulis secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Surakarta, juga disebut Solo atau Sala, apabila dilihat secara geografis letak wilayah Kota Surakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian \pm 95 meter diatas permukaan laut, yang memiliki luas 44 km². Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang. Wilayah ini dulunya merupakan wilayah bentukan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda yang berpusat di Batavia dan masih berbentuk Karesidenan. Secara administratif wilayah Kota Surakarta berbatasan dengan sejumlah wilayah kabupaten di Jawa Tengah. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Sebelah Timur berbataaan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar (Wasino, 2006:13).

Surakarta merupakan salah satu pusat budaya Jawa karena di kota ini terdapat dua

istana peninggalan Kerajaan Mataram Islam, yakni Kasunanan dan Pura Mangkunegaran. Kedua istana itu dimasa lalu selain sebagai pusat pemerintahan bumiputra juga sebagai pusat pengembangan budaya Jawa yang menjadi panutan penduduknya. Surakarta merupakan daerah pemukiman yang cukup tua.

Faktor-Faktor Pemicu Kerusuhan Anti Tionghoa Tahun 1972-1998

Peristiwa rasial anti Tionghoa di Kota Surakarta ini memiliki faktor pemicu kerusuhan berskala kecil yang menjadi karakteristik unik yang mampu menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius yang menelan banyak korban serta menyebabkan kerusakan-kerusakan dan masalah-masalah lain hingga menjalar ke luar kota Surakarta. Terdapat tiga faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi peristiwa rasial antara etnis Tionghoa dengan pribumi Jawa di Surakarta tahun 1972-1998, antara lain sebagai berikut.

1. Provokasi-provokasi hingga terbentuknya mobilisasi massa.

Kerusuhan rasial pada tahun 1972, mobilisasi massa terbentuk ketika mendengar berita terbunuhnya tukang becak oleh warga keturunan Arab menyebabkan pada pagi harinya tukang-tukang becak se-Surakarta dengan cepat mengerombol mendatangi lokasi kejadian karena adanya provokasi untuk memprotes pelaku pembunuhan. Dari menit ke menit aksi tersebut terus berkembang (Rustopo, 2007:100). Mobilisasi massa juga menjadi penyebab membesarnya peristiwa huru-hara tahun 1980 di Surakarta. Dalam peristiwa ini mobilisasi massa mulai terbentuk karena adanya provokasi oleh Pipiet karena tidak terima atas penyerangan yang menimpanya kemudian Pipiet berhasil mengumpulkan teman-teman sekolahnya. Sekitar 50 orang siswa bergerak menuju jalan Urip Sumoharjo untuk mengadakan aksi demonstrasi (Wasino, 2006: 65). Mobilisasi massa dalam kerusuhan Mei 1998 sudah terjadi ketika terjadi aksi damai di kampus UMS. Ketika aksi mahasiswa gagal diredam aparat keamanan dan berhasil keluar kampus, jumlah massa pun semakin bertambah banyak,

setelah bergabungnya sejumlah pemuda yang telah bergerombol di kawasan Kleco (Riyadi, 2015, 91). “Ketika di rumah ada yang memanggil dari luar pagar “Jowo opo Cino?(Jawa apa Cina?) yen jowo ayo melu ngobongi omahe Cino! (kalau Jawa mari ikut membakar rumahnya Cina)” (Wawancara dengan Bapak Tri Bandoro, tanggal 10 Mei 2017). Ajakan-ajakan seperti itu yang membuat massa cepat terkumpul memadati di hampir seluruh jalan-jalan utama di kota Surakarta. Mereka mengajak warga ikut dalam kerusuhan ketika bergerak menuju pusat kota Surakarta.

2. Konflik Individual

Konflik antar individu dalam kerusuhan tahun 1972 dan 1980 di Surakarta menjadi awal kerusuhan yang sangat besar. Seharusnya konflik antar individu ini tidak seharusnya dapat menyebabkan kerusuhan massa yang mengerikan. Namum uniknya disini adalah konflik yang hanya melibatkan beberapa orang bisa memicu konflik yang serius. Konflik tahun 1972 di Surakarta, merupakan masalah sepele yang bermula dari ketidaksepahaman antara seorang *encik* Arab dengan penarik becak (Riyadi, 2015: 90). Masalahnya adalah ketidaksepahaman masalah pembayaran jasa. Akhirnya terjadilah perang mulut dan saling memukul yang berakhir terbunuhnya tukang becak itu (Rustopo, 2007:100). Pada peristiwa kerusuhan tahun 1980 juga berawal dari konflik antar individu. Perkelahian antara Supriyadi alias Pipit dengan seorang pemuda WNI keturunan bernama Kicak alias Maryono di depan toko Orlane pada hari Rabu jam 12.00 (Suara Merdeka, tanggal 21 November 1980). Awalnya terjadi senggolan sepeda yang dikendarai ketiga siswa yang baru pulang sekolah itu dengan seorang pemuda Tionghoa yang sedang menyeberang di jalan Urip Sumoharjo. Kicak yang tidak terima menyerang Pipit menderita luka-luka karena terkena pukulan pemuda Tionghoa yang bernama Kicak (Setiono, 2002: 1025-1026).

3. Aksi Mahasiswa

Peristiwa 14 Mei 1998 dimulai dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi di dua tempat, yakni di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Pabelan

dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kientingan, Surakarta. Dari kedua aksi itu memunculkan kekerasan massa yang dimulai dari kampus UMS (Wasino, 2006: 68). Kejadian itu kemudian melebar, dan mahasiswa mulai bergerak keluar kampus. Aksi damai sekaligus aksi menuntut adanya reformasi yang digelar mahasiswa berubah seketika menjadi bentrok yang besar, di tambah lagi dengan keterlibatan masyarakat sekitar yang mudah terprovokasi menjadikan aksi ini sebagai awal terjadinya kerusuhan Mei 1998.

Kronologis Kerusuhan Rasial di Surakarta Tahun 1972-1998

Kerusuhan mengerikan pada tahun 1972 itu diawali dari peristiwa pembunuhan seorang tukang becak oleh warga keturunan Arab di Pasar Kliwon (Rustopo, 2007: 99-100). Kerusuhan itu bermula dari ketidak sepahaman antara seorang *encik* Arab dengan seorang penarik becak yang berakhir dengan meninggalnya seorang penarik becak. Kabar meninggalnya tukang becak dengan cepat menyebar ke seluruh kota Surakarta, dan kemudian menyulut kemarahan massa lapisan bawah (Riyadi, 2015: 90). Pagi hari setelah kejadian itu, tukang-tukang becak se-Surakarta dengan cepat menggerombol mendatangi lokasi kejadian, dan memprotes pelaku pembunuhan. Pada sore hari sampai malam harinya massa melakukan perusakan dan pembakaran toko-toko di Pasar Pon dan jalan Coyudan yang ternyata milik orang-orang Tionghoa. Yang menarik, yang dirusak itu bukan toko milik orang-orang Arab saja, tetapi milik pedagang-pedagang Tionghoa (Rustopo, 2007: 100).

Delapan tahun setelah kerusuhan 1972, pada tahun 1980 pecah lagi kerusuhan yang lebih besar. Kerusuhan ini dilatarbelakangi oleh kejadian tabrakan lalu-lintas di jalan sekitar Warung Pelem pada 19 November 1980, antara pipit (Jawa) pelajar Sekolah Guru Olahraga (korban) dan kicak, seorang pemuda Tionghoa. Kemudian disusul dengan pemukulan pipit oleh kicak (Rustopo, 2007: 100-101). Tanggal 20 Nopember 1980, Pipiet mengumpulkan teman-teman sekolahnya. Sekitar 50 orang siswa bergerak menuju Jalan Urip Sumoharjo untuk

mengadakan aksi demonstrasi. Sambil meneriakkan yel-yel untuk menyerahkan pelaku (Wasino, 2006: 65). Peristiwa ini dengan cepat berkembang menjadi kerusuhan massal di bagian-bagian Kota Surakarta yang terdapat pertokoan milik orang-orang Tionghoa. Massa selain merusak dan membakar toko-toko, juga menjarah semua isinya (Rustopo, 2007: 101). Aksi anarkis yang berlangsung selama beberapa hari lamanya, dimulai daerah Coyudan kemudian menjalar ke daerah-daerah lainnya dan ditunggangi para “gali” (gang anak liar) yang menjarah toko-toko tersebut. Dengan cepat kerusuhan menjalar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, Banyubiru, Candi dan Semarang. Di kota ini para perusuh melempari semua rumah dan toko milik Tionghoa. (Setiono, 2002: 1027)

Setelah Surakarta tenang selama 18 tahun, timbul lagi kerusuhan anti Tionghoa yang lebih besar pada Mei 1998. Aksi mahasiswa di UMS muncul sebagai reaksi solidaritas memprotes tindakan kekerasan aparat keamanan pada peristiwa Trisakti tanggal 12 Mei 1998 (Wasino, 2006: 68). Kerusuhan di kota Surakarta tahun 1998 terjadi selama dua hari yaitu pada tanggal 14 Mei – 15 Mei 1998, pada awalnya kerusuhan dimulai di area kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) namun pada akhirnya kerusuhan tersebut meluas hingga keluar kampus UMS. Sejak pukul 09.30 WIB pada tanggal 14 Mei 1998 ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surakarta berkumpul di Pabelan (depan kampus UMS). Mereka berencana mengadakan pawai jalan kaki menuju balaikota Surakarta. Pada pukul 10.00 WIB mereka mulai bergerak mendekati jalan raya Surakarta-Kartasura, tetapi ditahan oleh aparat (Rustopo, 2007: 102). Pukul 14.50 kendaraan perintis (Rantis) dan Panser Brimob memasuki lokasi dan berupaya memecah barisan mahasiswa. Tembakan air berkali-kali dari Rantis dan Panser tidak meredakan suasana. Hingga pukul 17.45 aksi mahasiswa bubar dan satu persatu meninggalkan lokasi. (Jusuf dkk, 2007: 63). Pagi harinya (dini hari), pada tanggal 15 Mei 1998 masih berlangsung kerusuhan dengan pola yang sama dengan peristiwa sebelumnya. Sejak tengah malam sudah terjadi pembakaran ulang di

kawasan pertokoan dan perkantoran Beteng Plaza, Pusat Grosir Solo dan sekitarnya. Pada siang hari massa menjarah area Pasar Legi, Sumber, Nusukan, Jongke dan Grogol. Toko-toko milik warga etnis Tionghoa seperti Swalayan Planet, Sampurna dan pertokoan lainnya dibakar oleh massa. Di daerah Jongke beberapa ruko milik warga etnis Tionghoa (ekonomi menengah) habis terbakar (Jusuf dkk, 2007:70-71).

Dampak Kerusuhan Anti Tionghoa Tahun 1972-1998

Dampak Kerusuhan Tahun 1972

Dampak dalam peristiwa tahun 1972 dibagi menjadi dua, yaitu dampak Material dan dampak ekonomi.

1. Dampak Material. Pada peristiwa ini kerumunan-kerumunan massa bergerak ke perkampungan Arab di daerah Pasar Kliwon dan ke pusat-pusat perdagangan untuk merusak toko-toko milik orang Arab. Pada sore hari dampak dari kerusuhan tersebut meluas hingga ke daerah Pasar Pon dan Jl. Coyudan untuk merusak dan membakar toko-toko yang ternyata milik orang-orang Tionghoa (Rustopo, 2007: 100). Puluhan bangunan toko dan rumah-rumah milik orang Arab dan Tionghoa mengalami kerugian besar karena hampir semua toko-toko serta rumah-rumah mereka disepanjang Jl. Coyudan, pasar Kliwon dan pasar Pon hancur dan hangus di bakar oleh massa.
2. Dampak Ekonomi. Perekonomian di wilayah pasar Kliwon, pasar Pon dan Jl. Coyudan serta wilayah-wilayah disekitarnya lumpuh total selama beberapa hari karena toko-toko baik di pasar maupun di kios-kios pinggir jalan tutup. Tidak ada aktivitas perekonomian di daerah tersebut. Pedagang tidak berani membuka tokonya karena takut ada kerusuhan susulan. Akibatnya barang-barang kebutuhan sehari-hari jadi langka. Warga sekitar kerusuhan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Dampak Kerusuhan Tahun 1980

Dampak yang dihasilkan akibat kerusuhan tahun 1980 lebih besar dari kerusuhan sebelumnya. Karena peristiwa ini melibatkan para *gali* (preman). Pada tanggal 21 Nopember 1980, hampir semua toko-toko Cina di ruas-ruas jalan besar menjadi sasaran amuk massa. Toko-toko milik Cina di Jl. Slamet Riyadi, Jl. Dr. Radjiman, Jl. Sidomulyo, Sondakan dan Laweyan menjadi sasaran pada hari itu (Wasino, 2006:66). Kemudian juga terjadi pembakaran di pabrik Cemani yang menyebabkan kerugian besar yang diderita oleh pabrik tersebut. Akibat aksi-aksi anarkis tersebut, ribuan buruh menjadi pengangguran karena tidak semua perusahaan yang dirusak dapat segera membangun pabriknya kembali. Namun disamping kerugian materiil terlebih lagi kerugian yang paling besar adalah terganggunya hubungan antara penduduk pribumi dengan penduduk etnis Tionghoa di Jawa Tengah yang selama ini terkenal rukun dan harmonis. Sudah tentu diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan “luka-luka” tersebut (Setiono, 2002:1028). Geger anti Cina yang terjadi di Surakarta itu kemudian meluas di kota-kota lain di Jateng bahkan ke Jawa Timur. Diantara kota-kota yang terpengaruh kerusuhan itu antara lain Semarang, Kudus, Purwodadi, Tembung, Jepara, Rembang dan sebagainya (Wasino, 2006:67). Kota-kota di Jawa Timur yang terkena dampak dari aksi-aksi perusakan toko-toko milik etnis Tionghoa antara lain Ngawi, Madiun dan Jombang (Setiono, 2002:1026).

Dampak Kerusuhan tahun 1998

Dampak dari kerusuhan rasial tahun 1998 lebih mengerikan dibandingkan dengan kerusuhan dua periode yang lalu. Kerusuhan ini lebih merata di seluruh penjuru kota Surakarta dan sekitarnya. Solo seolah-olah menjadi kota mati yang habis di bombardir musuh. Suasana mencekam semakin terasa oleh kobaran api dan kabut asap hitam yang menggelapkan udara. Reruntuhan gedung, ribuan bangkai sepeda motor, ratusan bangkai mobil, dan barang-barang terbakar masih malang melintang di seluruh ruas jalan. Demikian juga puluhan bangkai bus yang dibakar massa belum dipindahkan dari

tempatnyanya (Jawa Pos, 16 Mei 1998). Sektor perekonomian merupakan salah satu bidang yang paling merasakan dampak yang cukup besar karena pusat-pusat perdagangan yang menjadi kekuatan perekonomian di kota Surakarta mengalami kelumpuhan karena hancur di bakar dan habis dijarah oleh massa selama kerusuhan, oleh sebab itu terjadi kelangkaan barang dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemilik toko di wilayah pinggiran kota juga merasakan ketakutan ketika ingin membuka tokonya untuk berjualan, tidak hanya penjual dari kalangan Tionghoa saja, bahkan orang-orang Pribumi pun juga ketakutan.

Sektor transportasi juga lumpuh total, serta meninggalkan trauma yang melanda warga Surakarta, seperti yang sudah diberitakan dalam (Jawa Pos, 18 Mei 1998). Hampir tidak ada kendaraan bermesin lewat di jalan-jalan utama, kecuali konvoi kendaraan roda dua para demonstran dan aparat keamanan (Jawa Pos, 16 Mei 1998). Bus-bus dari arah Jawa Timur tidak berani masuk ke Jawa Tengah. Sesampai di ngawi petugas langsung memberitahu situasi, sehingga banyak penumpang yang hendak ke Solo memilih “balik kucing”. Demikian pula dari arah Semarang dan Yogyakarta, tidak ada satu pun angkutan umum yang berani masuk.

Dunia pendidikan juga merasakan dampak dari kerusuhan ini. Seperti yang diberitakan (Jawa Pos, 16 Mei 1998) bahwa hampir semua sekolah, mulai Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah harus memulangkan siswanya lebih awal. Sedangkan beberapa sekolah mengah ditinggalkan siswa-siswanya yang memilih ikut konvoi keliling kota. Di Kabupaten Sukoharjo juga merasakan dampaknya, dikutip dari (Suara Merdeka, 16 Mei 1998) bahwa, ribuan pelajar yang akan berangkat sekolah tertahan dipinggir jalan. Hanya pelajar yang diantar atau menggunakan kendaraan pribadi yang bisa sampai sekolah. Namun, para guru mengambil keputusan untuk memeliburkan mereka.

Upaya Penanganan Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Pada Tahun 1972, 1980 dan 1998

1. Peran ABRI. Peran ABRI dalam peristiwa rasial di Surakarta yang pada saat itu masih gabungan antara TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Kepolisian berperan sangat vital dalam menghalau kerusuhan rasial di Surakarta, segala kekuatan dikerahkan agar kerusuhan cepat diredam serta ikut menjaga situasi agar tetap tenang, bahkan secara berkala anggota kepolisian setempat dibantu anggota TNI melakukan pemantauan di berbagai lokasi kerusuhan guna memastikan keadaan aman dari para perusuh. Penanganan peristiwa tahun 1972 tidak melibatkan anggota TNI maupun Kepolisian sebanyak dalam peristiwa tahun 1980 dan 1998, karena peristiwa ini hanya berlangsung dalam skala lokal di wilayah Surakarta. Namun tetap terdapat penjagaan-penjagaan dari aparat keamanan di lokasi-lokasi kerusuhan maupun jalan-jalan utama untuk mencegah timbulnya kekacauan susulan yang mungkin bisa terjadi kapan saja. Kepolisian dan TNI dalam peristiwa kerusuhan tahun 1980 saling melengkapi. Ketika peristiwa tidak berhasil diredam oleh aparat kepolisian. Kemudian diambil alih langsung oleh Kodam IV/Diponegoro. Dalam penanganan itu aparat diberi hak untuk bertindak represif dalam bentuk melakukan penembakan ditempat terhadap pelaku kerusuhan, dan melakukan penangkapan, penahanan, dan penyidikan. Mereka yang ditahan dan disidik di Detasemen Intelijen Kodam IV/Diponegoro sebanyak 201 orang. Ditinjau dari asal-usul profesinya ternyata bervariasi, mulai dari mahasiswa, pelajar, gali, hingga pegawai negeri. Akan tetapi yang paling banyak adalah mahasiswa dan pelajar sekolah.” (Wasino, 2006:67-68). Dalam menangani kerusuhan rasial tahun 1998 sikap ABRI sangat tegas dalam upaya menangani kerusuhan di Surakarta, seperti yang dinyatakan dalam (Jawa Pos, 16 Mei 1998) katanya, tidak akan segan menindak tegas pelaku kerusuhan dan kekacauan. Sikap dari ABRI ini diharapkan dapat meredam kerusuhan agar tidak semakin meluas. Selama kerusuhan berlangsung kota Surakarta dijaga

ketat oleh aparat keamanan dari TNI AD dan dari berbagai kesatuan lain. Pangdam Diponegoro IV Mayjen TNI Tyasno Sudarto didampingi Danrem 074 Warastratama, Surakarta, Kol Inf Sriyanto, mengharapkan masyarakat tidak panik lagi. ABRI menjamin keamanan dan kenyamanan warga. Pangdam juga mengingatkan, sanksi tembak di tempat tetap diberlakukan agar perusuh berhenti melakukan aksinya (Jawa Pos, 17 Mei 1998).

2. Peran Pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menangani kerusuhan rasial di Surakarta. Peran pemerintah baik itu dari pemerintah kota Surakarta sampai pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut memberikan sikap tegas dan membantu menenangkan masyarakat yang tengah takut serta khawatir dengan kondisi kota Surakarta dan sekitarnya yang luluh lantak akibat konflik rasial yang mengerikan. Anggota Muspida Kotamadya Surakarta pada tahun 1980, Kamis serta Jumat pagi turut turun kelapangan guna menenangkan suasana. Walikota Sukatmo SH, lewat seruannya menghimbau warga kota setempat untuk tidak mudah terpancing isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Ia menyebutkan pula akan menindak mereka yang jelas bersalah serta mendalangi peristiwa itu (Kompas, 22 November 1980). Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta juga telah memunculkan sikap keprihatinan pemerintah, baik itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah Kota Surakarta. Gubernur Jawa Tengah maupun Walikota Surakarta sama-sama menyerukan himbauan-himbauan kepada seluruh korban kerusuhan serta mengutuk tindakan tidak bertanggung jawab kepada para perusuh. Gubernur Soewardi menyatakan kerusuhan itu telah melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dan menyengsarakan warga kota Sala. Karena itu, pihaknya mengajak segenap warga untuk mengatasi bersama dampak yang timbul dari kerusuhan. Tidak satu pun warga yang mendukung kerusuhan itu, justru mengutuknya. Mereka menginginkan aparat menindak tegas para

pelaku," tandas Gubernur, seusai berkoordinasi dengan pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Tyasno Sudarto, Walikota Imam Sutopo dan Danrem Kol Sriyanto.

3. Peran Organisasi. Dahsyatnya peristiwa rasial di Surakarta memunculkan sikap simpati dari berbagai macam organisasi di Surakarta, pada tahun 1980 Pangdam VII/Diponegoro mengucapkan terima kasih atas peran beberapa organisasi seperti yang tertulis dalam (Siswoyo, 1981:14-25) "... kami merasa sangat berterima kasih atas pernyataan yang sangat membesarkan hati dari pembuka-pembuka kekuatan sospol, para alim ulama serta kalangan muda yang tergabung dalam KNPI dan AMPI yang telah memberikan dorongan moril yang kuat kepada kami untuk menangani peristiwa yang menyedihkan dalam masyarakat kita tadi sampai tuntas". Pada tanggal 16 Mei 1998 di Solo, sekelompok orang yang menamakan diri Solidaritas Mahasiswa Peduli Rakyat (SMPR) mengeluarkan pernyataan sikap, esensinya antara lain, SMPR mengecam tindakan brutal masyarakat tersebut, karena kerusuhan tersebut merupakan kontra produktif bagi aksi reformasi dan menolak dengan tegas, bahwa kerusuhan tersebut sama sekali bukan bagian dari aspirasi mahasiswa dalam menuntut reformasi politik, ekonomi dan hukum." (Sekretaris Wakil Presiden 1967-1999, No. 476, Arsip Nasional Indonesia). SMPR Universitas Sebelas Maret menyatakan mengecam pihak-pihak yang telah melakukan kerusuhan dengan memanfaatkan atau "numpang lewat" melalui aksi keprihatinan mahasiswa (Solo Pos, 18 Mei 1998). Oleh karena itu SMPR akan gelar aksi keprihatinan.

Kecaman dan kutukan terhadap aksi kerusuhan yang diwarnai perusakan dan penjarahan juga mengalir ke redaksi SOLOPOS dari sejumlah organisasi kemasyarakatan di Solo. Mereka yang melayangkan kecaman terhadap perusuh itu diantaranya Forum Hati Nurani (Fortini) Mahasiswa dan Ko-ass (Dokter Muda)

Fakultas Kedokteran UNS, Komite Independen STIE Surakarta, Forum Komunikasi Antar Daerah (Forkomanda) Pelajar Islam Indonesia (PII) Jateng Zona Selatan, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Pancasila (PP), serta Angkatan Muda Muslimin Surakarta (AMMS) dan beberapa Ormas lainnya.

SIMPULAN

Kota Surakarta sebagai pusat konflik terkenal dengan masyarakatnya yang lemah lembut, santun, perhitungan dan mengedepankan keharmonisan. Peristiwa rasial di Surakarta yang selama ini terjadi mengandung tanda tanya besar. Sikap santun dan lemah lembut masyarakat Surakarta ternyata mengandung sikap agresif yang luar biasa. konflik rasial di eks-Karesidenan Surakarta ini sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda. Sekitar dua setengah abad yang lalu, yang dikenal dengan “Bedah Kartasura” pada tahun 1742.

Peristiwa rasial anti Tionghoa di Kota Surakarta ini memiliki faktor pemicu kerusuhan berskala kecil yang menjadi karakteristik unik yang mampu menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius yang menelan banyak korban serta menyebabkan kerusakan-kerusakan dan masalah-masalah lain hingga menjalar ke luar kota Surakarta. Faktor pemicu konflik di Surakarta pada tahun 1972-1998 yaitu terbentuknya mobilisasi massa, konflik individual serta aksi mahasiswa. Konflik rasial di Surakarta pada masa Orde Baru terbagi menjadi tiga periode konflik yaitu pada tahun 1972, 1980, dan 1998. Akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar, berbagai sektor mulai dari sector ekonomi, pendidikan, transportasi serta kerugian material dialami oleh hampir seluruh masyarakat kota Surakarta. Untuk menangani konflik tersebut banyak pihak yang berperan, seperti ABRI, Pemerintah hingga Organisasi-organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Sekretaris Wakil Presiden RI 1967-1999 No. 476, Arsip Nasional Republik Indonesia.

Buku

- Jusuf, Ester Indahyuni. dkk. *Kerusuhan Mei 1998 : Fakta, Data dan Analisa*. Jakarta : SNB dan APHI.
- Onghokham. 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Pranoto, Suhantono W. 2010. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Riyadi. 2015. *Etnis Tionghoa Surakarta Abad XX*. Surakarta: UNS Press.
- Rustopo. 2007. *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895-1998*. Yogyakarta: Ombak.
- Setiono, Benny. G. 2002. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- Siswoyo, Bambang. 1981. *Huru-Hara Solo Semarang: Suatu Reportase*. Jakarta. Bhakti Pertiwi.
- Wasino. 2006. *Wong Jawa dan Wong Cina : Lika-Liku Hubungan Sosial antara Etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo tahun 1911-1998*. Semarang: UNNES Press.
- Windy Kinasih, Ayu. 2007. *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*. Yogyakarta: JIP.

Koran

- Jawa Pos, Tanggal 16 Mei 1998.
- Jawa Pos, Tanggal 17 Mei 1998.
- Kompas, Tanggal 22 November 1980.
- Suara Merdeka, Tanggal 21 November 1980.

Wawancara

- Wawancara dengan bapak Tri Bandoro, Tanggal 10 Mei 2017.